

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan pasti memiliki beberapa tujuan yang harus dicapai oleh manajemen dan pemilik. Pertama, pengusaha ingin mencapai pengembalian yang optimal untuk bisnis mereka dan yang kedua, pemilik ingin bisnis bertahan lama. Untuk mencapai kedua tujuan ini, manajemen harus memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan yang tepat dan akurat. Selama waktu tertentu, manajemen juga harus dapat melaporkan semua operasi perusahaan untuk memantau kinerjanya (Kasmir, 2016).

Istilah *Good Corporate Governance* atau disingkat GCG, mengacu pada serangkaian aturan, pedoman, atau praktik yang memungkinkan pemegang saham, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memandu dan mengatur bisnis menuju hasil tertentu (Omolaye and Jacob, 2018). Dengan menggunakan *good corporate governance* yang efektif untuk memungkinkan pengambilan keputusan sesuai dengan arahan perusahaan, GCG berupaya mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan dan bukan hanya memenuhi kepentingan sebagian saja (Susanti & Handayani, 2022). Bisnis akan berkembang dan beroperasi dengan konsisten jika GCG diterapkan secara teratur. Sejak skandal Amerika Serikat seperti *Enron* dan *WorldCom*, pentingnya tata kelola perusahaan yang baik telah terbukti. Kasus ini melibatkan pejabat pemerintah, manajer bisnis, auditor, dan orang lain yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi perusahaan. Sehubungan dengan hal ini, komunitas korporasi semakin tidak percaya pada

keandalan kantor akuntan publik, dan masyarakat semakin khawatir tentang proses GCG yang efektif. (Mohammadi et al., 2019)

Konsep tata kelola perusahaan yang baik mulai mendapat perhatian publik selama krisis ekonomi Indonesia tahun 1997. Salah satu penyebab utama krisis tersebut adalah tata kelola perusahaan yang tidak efektif, yang masih berdampak hingga saat ini (Manurung et al., 2019). Sektor perbankan Indonesia juga sering mengalami masalah tentang manajemen perusahaan yang baik. Sejumlah skandal keuangan, termasuk penggelapan dana, penipuan, perampokan, dan penyimpangan pegawai bank dapat muncul sebagai akibat dari masalah ini. Akibatnya, industri perbankan diharapkan untuk menerapkan kerangka pengendalian internal yang lebih baik, mengurangi jumlah kasus skandal keuangan, meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan calon investor, dan yang paling penting meningkatkan kinerja keuangan. Suatu bank dianggap memiliki tata kelola yang kuat jika memiliki kinerja finansial yang baik. Hal ini menunjukkan hubungan antara kinerja keuangan bank dan manajemen perusahaan yang baik.

Menurut informasi yang diperoleh dari media online [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com) pada hari Rabu, 7 Oktober 2020 pukul 10:24 WIB, mantan direktur utama PT Bank Tabungan Negara ditemukan telah menerima suap Rp 2,257 miliar atas nama Yunan Anwar. Menurut laporan dari media online [Kompas.co](https://www.kompas.co), kejahatan di sektor perbankan sering terjadi. Pada Januari 2020, *Commonwealth Bank* mengalami pencurian yang melibatkan pencurian dana senilai Rp 250 juta milik Ilham Bintang. Kasus yang terjadi pada 2019 melibatkan Bank Mandiri yang mencairkan pendebitan senilai Rp 6 miliar dengan memalsukan tanda tangan Annar Salahuddin

Sampetoding. Selain itu, Winda Earl pelanggan Maybank Cipulir di Jakarta, kehilangan Rp 22 miliar uang setoran pada November 2020.

Fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik belum diterapkan secara optimal oleh perbankan di Indonesia dan Asia. Masalah keuangan dapat terjadi karena praktik tata kelola perusahaan yang buruk. Tidak adanya pelaporan kinerja keuangan dan kurangnya pengawasan terhadap tindakan manajemen oleh dewan komisaris dan auditor termasuk salah satu kekurangan yang ditemukan. Banyak perbankan mulai percaya bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik dapat digunakan sebagai ukuran tanggung jawab dan merupakan keharusan dalam dunia perbankan (Rahardjo & Wuryani, 2021).

Kasus pegawai bank BRI melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp 1 Miliar pada tanggal 18 Mei 2019 menjadi bukti lain bahwa belum maksimalnya penerapan GCG di Indonesia (Tribunnews.Com, 2019). Kasus serupa juga terjadi yang dilakukan oleh pegawai bank BRI dengan melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp 12,1 Miliar pada tanggal 25 Juni 2019 (Wartaekonomi.Com, 2019). Dimana kedua kasus tersebut menjadi bukti yang menunjukkan lemahnya pengamatan kegiatan manajemen oleh auditor dan dewan komisaris dan menunjukkan pelaporan kinerja keuangan belum maksimal sehingga tindak pidana korupsi baru terbongkar pada beberapa tahun berikutnya. Hal tersebut terjadi karena adanya *agency conflict* dimana pihak yang diberi wewenang memiliki perbedaan kepentingan dengan pihak yang memberi wewenang.

Good corporate governance mengacu pada serangkaian prinsip, kebijakan, dan praktik yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, melindungi kepentingan pemangku kepentingan lainnya, dan memastikan transparansi, akuntabilitas dan integritas dalam tata kelola perusahaan. *Good corporate governance* diterapkan untuk meningkatkan manajemen perusahaan, efisiensi dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Pada penelitian ini *good corporate governance* diprosikan dengan Dewan Komisaris Independen (DKI), Komite Audit (KA), dan Kepemilikan Institusional (KI).

Tabel 1. 1
Daftar Indikator GCG Perbankan Tahun 2018-2022

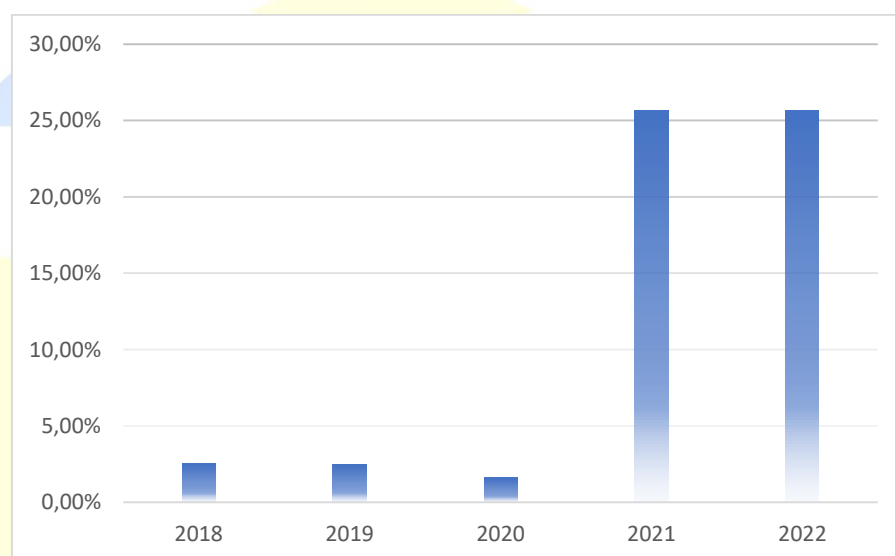
KODE	NAMA PERUSAHAAN	DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN	KOMITE AUDIT	KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
AGRO	PT Bank Raya Indonesia Tbk	200,00%	3,4	86,77%
ARTO	PT Bank Jago Tbk	140,00%	2,8	39,98%
BBCA	PT Bank Central Asia Tbk	150,00%	3	54,94%
BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	181,67%	6,4	20,41%
BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	176,67%	7	37,60%
BBTN	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	111,67%	5	27,61%
BJTM	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	130,00%	3,2	11,80%
BMAS	PT Bank Maspion Indonesia Tbk	130,00%	3	70,71%
BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	100,00%	7	44,78%
BSIM	PT Bank Sinarmas Tbk	200,00%	3	62,60%
MAYA	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	96,67%	3,2	31,70%
NISP	PT Bank OCBC NISP Tbk	160,00%	4,8	85,08%
SDRA	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	160,00%	4,4	86,79%
	RATA – RATA	148,83% (1,4883)	4,32	50,36% (0,5036)

Sumber: Data diolah oleh penulis (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan data rata-rata indikator GCG yang tinggi pada dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan saham mencerminkan kesehatan tata kelola perusahaan yang baik. Tingginya tingkat independensi dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris Independen menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan keberlanjutan dalam manajemen perusahaan. Komite Audit yang efisien dan kepemilikan saham yang seimbang mengindikasikan adanya kontrol yang kuat terhadap aspek keuangan dan keputusan strategis perusahaan. Dengan demikian, keseluruhan indikator GCG memberikan gambaran positif tentang praktik tata kelola perusahaan yang dapat memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan dan mendukung kinerja jangka panjang perusahaan.

Mengingat peran sektor perbankan yang penting dalam sistem perekonomian, terutama sebagai sarana pertumbuhan, maka penerapan tata kelola perusahaan yang baik di sektor perbankan menjadi sangat penting. Sejak tahun 2006 telah diterbitkan peraturan Bank Indonesia (PBI) di Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik khususnya di bidang perbankan, namun hingga saat ini praktik tersebut belum efektif diterapkan. Pada tahun 2007–2012, Indonesia menduduki peringkat rendah dalam pelaksanaan *good corporate governance* dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Kinerja keuangan bank menggambarkan tingkat keberhasilan yang telah dicapai dalam kegiatan operasionalnya. Ini adalah komponen yang signifikan dan penting dalam mengevaluasi kinerja keseluruhan bank, dimulai dengan evaluasi aset, utang, likuiditas, profitabilitas, dan faktor-faktor lainnya (Andika, M., & Fitriani, 2018).

Keberhasilan bank dapat dievaluasi dengan melihat laporan keuangannya. Kajian terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan dilakukan untuk mengetahui seberapa baik perusahaan tersebut telah menerapkan aturan pelaksanaan keuangan (Zhang, 2020). Penelitian ini menggunakan rasio keuangan yaitu ROA (*Return on Assets*). Proksi ROA lebih relevan dalam mengukur kinerja keuangan karena mencakup seluruh aset perusahaan. ROA menggambarkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh investasinya, tanpa memandang struktur modal.



Sumber: Data diolah penulis (2023)

Gambar 1.1
Kinerja Keuangan Perbankan Umum Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa rasio ROA mengalami fluktuasi. Dari gambar di atas dapat dilihat adanya penurunan rasio ROA secara terus menerus selama tiga tahun belakangan ini yaitu 2018 sebesar 2,55% menjadi 2,47% pada 2019, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan nilai rasio ROA sebesar 1,59%. Hal ini menunjukkan pergerakan pertumbuhan ROA pada perbankan umum kurang baik dan akan berdampak pada kinerja keuangan

perbankan. Perbankan umum yang dimaksud pada data di atas di antaranya yaitu, BNI, BRI, BCA, Bank Jago, OCBC, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, penambahan gender didasarkan pada hipotesis bahwa gender adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi proses pengembangan keputusan. Selama proses penyusunan, wanita dianggap lebih efektif dan efisien dalam menangani tugas-tugas kompleks. Pria biasanya tidak menggunakan semua data yang tersedia saat mengumpulkan informasi, yang menghasilkan jawaban yang kurang komprehensif. Demikian pula, perempuan cenderung lebih teliti dalam mengorganisasikan informasi dengan menggunakan data yang lebih luas dan memastikan bahwa informasi tersebut akurat dan sulit diingat. Gender wanita lebih baik dalam mengakses informasi daripada gender pria. Selain itu, perempuan lebih mampu mengingat informasi baru dibandingkan laki-laki, dan mereka juga memiliki ambang batas memori yang lebih rendah untuk memilah data yang tidak relevan.

Gender telah menjadi subjek banyak diskusi dalam beberapa waktu terakhir. Survei yang dilakukan oleh Grant Thornton pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 43% perempuan Indonesia bekerja di posisi manajemen puncak di perusahaan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi tertinggi kedua di seluruh dunia. Dengan kata lain, undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia memungkinkan perempuan untuk mencalonkan diri dan diangkat ke jabatan tinggi (Raharjanti, 2019).

Sama halnya dengan usia menjadi topik yang kontroversial, perbedaan gender atau jenis kelamin telah lama menjadi topik yang kontroversial. Di dunia

kerja saat ini, masih terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dianggap lebih kuat, lebih tegas, dan memiliki mentalitas keras yang dibutuhkan seorang pemimpin dibandingkan perempuan, yang dianggap lebih halus, sensitif, dan lemah lembut. Oleh karena itu, laki-laki dianggap lebih mampu memimpin dibandingkan perempuan. Meluasnya adopsi sudut pandang ini, peran perempuan tampaknya terbatas dalam masyarakat. Karena isu ini sudah diterima secara luas, namun sering ditemukan bahwa banyak dunia usaha yang belum sepenuhnya menganut kesetaraan gender dalam kaitannya dengan posisi laki-laki (L) dan perempuan (P) dalam pengambilan keputusan (Rompis et al., 2018).

Tabel 1. 2
Presentase Rata-Rata Jumlah Gender 13 Perbankan Umum
Tahun 2018-2022

Nama Perusahaan	Dewan Komisaris (P)	Komite Audit (P)	Kepemilikan Institusional (P)	Dewan Komisaris (L)	Komite Audit (L)	Kepemilikan Institusional (L)
PT Bank Raya Indonesia Tbk	54,0%	30,0%	0,0%	34,3%	70,0%	100,0%
PT Bank Jago Tbk	13,3%	43,3%	24,7%	43,3%	56,7%	75,3%
PT Bank Central Asia Tbk	0,0%	46,7%	19,3%	60,0%	53,3%	80,7%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	0,0%	17,3%	26,6%	62,1%	82,7%	73,4%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	17,3%	19,4%	14,5%	46,3%	80,6%	85,5%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	0,0%	2,9%	10,2%	52,5%	97,1%	89,8%

Nama Perusahaan	Dewan Komisaris (P)	Komite Audit (P)	Kepemilikan Institusional (P)	Dewan Komisaris (L)	Komite Audit (L)	Kepemilikan Institusional (L)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	0,0%	0,0%	17,5%	52,0%	100,0%	82,5%
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	6,7%	0,0%	65,9%	48,7%	100,0%	34,1%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5,1%	4,7%	11,1%	45,7%	95,3%	88,9%
PT Bank Sinarmas Tbk	0,0%	0,0%	26,7%	66,7%	100,0%	73,3%
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	11,7%	25,0%	86,7%	40,0%	75,0%	13,3%
PT Bank OCBC NISP Tbk	12,2%	30,0%	100,0%	48,6%	70,0%	0,0%
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	10,0%	15,7%	0,0%	48,3%	84,3%	100,0%
RATA-RATA	10,02%	18,08%	31,02%	49,88%	81,92%	68,98%

Sumber: Data diolah oleh penulis (2023)

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa adanya perbedaan gender dari 13 perbankan umum tahun 2018-2022. Data menunjukkan adanya ketidakseimbangan gender dalam struktur kepemimpinan dan kepemilikan saham di perusahaan. Dewan komisaris independen (DKI) dan komite audit (KA) cenderung didominasi oleh laki-laki, masing-masing sebesar 49,88% dan 81,92%. Sementara itu, gender wanita dalam dua posisi tersebut hanya mencapai 10,02% dan 18,08%. Hal ini mencerminkan kurangnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis dan pengawasan internal perusahaan. Begitu pula,

kepemilikan institusional (KI) menunjukkan ketidaksetaraan gender, dengan 68,98% dimiliki oleh laki-laki dan hanya 31,02% dimiliki oleh perempuan. Ketidakseimbangan ini dapat mengindikasikan adanya masalah dalam mencapai diversifikasi gender di tingkat kepemimpinan dan kepemilikan saham, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dan perspektif yang diterapkan dalam perusahaan.

Terdapat beberapa *research gap* dalam penelitian ini, termasuk yang telah dilakukan Bancin & Harmain (2022) bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh tata kelola perusahaan yang efektif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 hingga 2020. Hasil penelitian ini yaitu bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki & Wuryani (2021) bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen perusahaan yang baik berdampak pada kinerja keuangan bisnis perbankan tahun 2014-2018. Hasil penelitian ini adalah bahwa dewan komisaris dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh pada kinerja keuangan, sedangkan dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit eksternal tidak memiliki pengaruh signifikan pada kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo & Wuryani (2021) bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana manajemen perusahaan

yang baik, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan memengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan. Hasil penelitian ini yaitu bahwa dewan direksi, komite audit, dan dewan komisaris independen sebagai variabel *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian terdahulu mengenai gender telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun hasilnya masih beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Nugrahani (2021) bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana gender anggota dewan, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional berdampak pada kinerja keuangan perusahaan di 15 subsektor bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2013 hingga 2017. Hasil penelitian ini yaitu terdapat pengaruh yang signifikan negative antara board gender terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Sedangkan, penelitian mengenai gender yang dilakukan oleh Nadia & Hanafi (2023) bahwa penelitian ini bertujuan untuk memeriksa bagaimana perbedaan gender di dalam dewan memengaruhi kebijakan dividen dan kepemilikan uang tunai di beberapa negara berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam dewan direksi meningkatkan kepemilikan kas dan dividen.

Hasil penelitian terhadap kinerja keuangan masih menemui keberagaman hasil. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa *research gap*. Pada penelitian ini dan penelitian terdahulu memiliki perbedaan dari beberapa segi aspek, seperti lama periode atau tahun, sampel perusahaan yang belum lengkap dan masih terbatas. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian kembali untuk

memberikan bukti secara empiris dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governane* Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Supaya lebih fokus dan terarah dalam menjawab rumusan tujuan penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup masalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian, yaitu tahun 2018 hingga 2022. Penelitian ini akan memilih sampel perbankan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti perusahaan yang memiliki laporan keuangan lengkap dan tersedia selama periode penelitian.
2. Variabel eksogen dalam penelitian ini yaitu *good corporate governance* yang diprosikan atau dengan indikator sebagai berikut, dewan komisaris independen (X_1), komite audit (X_2), dan kepemilikan institusional (X_3).
3. Variabel endogen pada penelitian ini yaitu kinerja keuangan yang diprosikan dengan rasio *Return on Assets* (ROA) sebagai Y.
4. Variabel moderasi penelitian ini yaitu gender (Z).
5. Penelitian dibatasi pada perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan laporan keuangan yang lengkap.
6. Waktu penelitian pada skripsi ini dilaksanakan selama 1 bulan.

1.3 Perumusan Masalah

Penelitian ini menunjukkan bahwa sektor perbankan di Indonesia menghadapi tantangan serius terkait kejahatan dan tindakan korupsi, seperti yang

terungkap dalam beberapa kasus di Bank Tabungan Negara, *Commonwealth Bank*, dan Bank Mandiri. Masalah-masalah seperti kurangnya pengawasan terhadap tindakan manajemen, tidak transparannya pelaporan kinerja keuangan, dan lemahnya kontrol internal menjadi kontributor utama terhadap masalah keuangan dan tindak pidana. Fenomena ini menggambarkan kurangnya penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik dalam industri perbankan di Indonesia secara umum. Kinerja keuangan perbankan umum selama tiga tahun terakhir mengalami tantangan serius. Penurunan ROA dari 2,55% pada tahun 2018 menjadi 1,59% pada tahun 2020 menunjukkan adanya dampak negatif yang berpotensi memengaruhi bank-bank terkemuka seperti BNI, BRI, BCA, Bank Jago, OCBC, dan lain-lain. Terdapat permasalahan signifikan terkait dengan ketidakseimbangan gender pada dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional di 13 perbankan umum selama periode 2018-2022, yang menunjukkan bahwa perempuan kurang terwakili dalam posisi strategis sesuai paa tabel 1.2. Dewan komisaris independen (DKI) dan komite audit (KA) menunjukkan dominasi laki-laki dengan persentase masing-masing sebesar 49,88% dan 81,92%, sementara perempuan hanya mencapai 10,02% dan 18,08%. Hal ini menggambarkan ketidakrepresentatifan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis dan pengawasan internal perusahaan. Demikian pula, kepemilikan institusional (KI) mencerminkan ketidaksetaraan gender, dimana 68,98% dimiliki oleh laki-laki dan hanya 31,02% dimiliki oleh perempuan. Ketidakseimbangan ini dapat menandakan adanya hambatan dalam mencapai diversifikasi gender di tingkat kepemimpinan

dan kepemilikan saham, yang berpotensi memengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan variasi perspektif yang diaplikasikan dalam perusahaan.

Berdasarkan uraian permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
4. Apakah gender memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan pada perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
5. Apakah gender memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan pada perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
6. Apakah gender memoderasi pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan dengan gender sebagai variabel moderasi pada perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
7. Apakah gender berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
2. Untuk menguji apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
3. Untuk menguji apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
4. Untuk menguji apakah gender memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan pada perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
5. Untuk menguji apakah gender memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan pada perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
6. Untuk menguji apakah gender memoderasi pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan pada perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
7. Untuk menguji apakah gender berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai penambah wawasan dan juga menambah referensi secara teoritis terkait penerapan *good corporate governance* dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan perbankan yang dikaji dengan perspektif *agency theory*.

2. Secara Praktis

1) Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan dapat menjadi bahan evaluasi dalam menerapkan *good corporate governance* yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

2) Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini bisa dijadikan tambahan referensi bagi peneliti berikutnya, khususnya bagi penelitian dengan topik yang serupa, yaitu pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan dengan gender sebagai variabel moderasi.